



BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance

Volume 1 Issue 2 2023 Page 99-108

[DOI: 10.37985/benefit.v1i1.14](https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14)

Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Yuda Mulia Ramadhan Sitepu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

✉ Corresponding author

yudamuliamadhan123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peran penting yang dimainkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, artikel ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan, seperti akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan dukungan kebijakan. Melalui pemahaman mendalam terhadap peran dan tantangan yang dihadapi UMKM, artikel ini memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah, untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung perkembangan UMKM sebagai agen utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menyajikan data dan analisis yang komprehensif. Hasil studi ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang berkelanjutan dalam mendukung UMKM sebagai salah satu solusi strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: *UMKM, Kemiskinan, Penyerapan Tenaga Kerja*

Abstract

This article discusses the important role played by Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in efforts to reduce poverty in Indonesia. Poverty is a complex and multidimensional social problem that requires a holistic approach to overcome its challenges. UMKM, as the backbone of the economy in Indonesia, have great potential to become agents of change in reducing poverty levels. In addition, this article analyzes the factors that influence the performance of UMKM in the context of poverty reduction, such as access to capital, skills training and policy support. Through an in-depth understanding of the role and challenges faced by UMKM, this article provides insight for stakeholders, including the government, financial institutions and non-governmental organizations, to design policies and programs that support the development of UMKM as the main agents in reducing poverty levels in Indonesia. This research uses qualitative and quantitative approaches to present comprehensive data and analysis. The results of this study can be a basis for formulating sustainable policies to support UMKM as a strategic solution in overcoming the problem of poverty in Indonesia.

Keyword: *UMKM, poverty, employment*

Article info:

Received 09 Juni 2023; Accepted 25 September 2023; Published 31 September 2023

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 27,5 juta jiwa atau 9,72% dari total penduduk. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang penting. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7% pada tahun 2024. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan dengan potensi besar untuk memainkan peran krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, UMKM di Indonesia telah tumbuh pesat, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor penting dalam kemakmuran masyarakat. Ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud maka saat itulah pendapatan masyarakat mencapai maksimum, namun jika menganggur atau tidak bekerja akan mengurangi pendapatan yang mana tingkat kemakmuran yang dicapai akan berkurang sehingga menyebabkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2004). Semakin besar tenaga kerja yang terserap maka semakin banyak pula masyarakat yang memiliki pendapatan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari kategori miskin. Artinya, penyerapan tenaga kerja akan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah tersebut. (Rini and Suguharti 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran konkret UMKM dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan melibatkan sektor ekonomi yang beragam, UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi inklusif yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang dinamika UMKM, tantangan yang dihadapi, serta potensi untuk memberdayakan masyarakat melalui peluang ekonomi lokal dapat memberikan pandangan yang lebih kaya tentang bagaimana UMKM dapat menjadi kekuatan pendorong utama dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja (Ardito et al., 2020). Namun, kekurangan penelitian yang merinci peran spesifik UMKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menjadi celah yang perlu diisi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjembatani kesenjangan pengetahuan ini dengan menggali lebih dalam tentang bagaimana UMKM dapat secara efektif berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi pembangunan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan program pengembangan yang dapat memperkuat peran UMKM sebagai mitra utama dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. (Kusumawardhani & Sukmawani, 2018)

Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan UMKM dengan memberikan berbagai fasilitas dan dukungan, seperti pelatihan, permodalan, dan akses pasar.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah UMKM yang berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik atau pengelola UMKM, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi tentang peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan UMKM. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti data statistik dan laporan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh suatu negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dari ukurannya. Hal ini disebabkan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait satu dengan lainnya.

Berkaitan dengan konsep kemiskinan maka tidak lepas dari konsep kesenjangan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Kusnet. Hipotesis Kusnet menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama Kurva U Terbalik dari Kusnets. Kusnet menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.

Penyebab Kemiskinan

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat kelompok ini.

Kemiskinan kultural atau ada beberapa ahli yang menyebut dengan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan pada suatu kelompok masyarakat sebagai suatu kondisi dalam suatu kelompok masyarakat yang menurut pandangan kelompok masyarakat lain kondisinya sangat miskin serba kekurangan dan perlu pertolongan segera, namun kelompok masyarakat itu sendiri merasa biasa-biasa saja bahkan "enjoy" dengan keadaannya. Hal inilah yang menyebabkan pihak-pihak lain atau kita akan kesulitan untuk

mengetaskan kemiskinan pada kelompok ini.

b. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi alam yang kurang menguntungkan berupa tanah tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumber daya mineral dan non mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, dimana masing-masing faktor saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah. Kondisi ini akan berakibat pada rendahnya investasi produktif karena sebagian dana yang digunakan untuk investasi diperoleh dari tabungan masyarakat yang pada gilirannya kembali mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.(Supriyanto 2012)

Perkembangan UMK di Indonesia sering terhalang oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMK di negara manapun juga, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yakni keterbatasan modal kerja maupun modal investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input-input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah), rendahnya kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya transaksi yang tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentu arahnya.(Tambunan et al. 2012)

Pelaku ekonomi adalah organ masyarakat yang mempunyai fungsi sekaligus:

- 1) Pertama, sebagai pemasok semua kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder dan tersier.
- 2) Kedua, sebagai penyerap tenaga kerja masyarakat. Dengan demikian, terjadilah hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pelaku ekonomi yang saling menguntungkan.

Kedua fungsi tersebut dapat saling mengisi sehingga pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat berjalan secara harmonis. Alasan utama pemerintah mempertahankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena UMKM mempunyai peran dalam pembangunan nasional dan penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa, melalui kewirausahaan UMKM berperan sangat

penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa. (Ikbal, Mustafa, and Bustami 2018)

Permasalahan Pemberdayaan UMKM

Beberapa permasalahan yang tengah di hadapi oleh sektor UMKM dewasa ini antara lain:

1. Perlunya perluasan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengoptimalkan serta mensinergikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan UMKM melalui intensifikasi dan perluasan penyaluran kredit dari lembaga perbankan/keuangan kepada UMKM secara sistemik dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, diprioritaskan untuk membuka akses lembaga perbankan dan keuangan untuk pengembangan UMKM, menyederhanakan prosedur dan persyaratan dan penjaminan usaha/kredit khususnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Peningkatan intensitas upaya pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan Konsultan Keuangan UMKM Mitra Bank (KKMB) guna meningkatkan ketersediaan tenaga pendamping usaha mikro. Terkait dengan hal ini, diperlukan upaya penyusunan panduan dan kebijakan untuk menentukan kedudukan serta penghargaan terhadap jasa profesional KKMB oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembina.
4. Penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam sistem perbankan nasional terutama untuk memperluas penyaluran kredit terutama untuk segmen usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini perlu diprioritaskan untuk menyiapkan landasan regulasi berupa Undang-Undang tentang LKM.
5. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Oleh karenanya, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat.
6. Inovasi produk layanan kredit/keuangan mikro harus terus dikembangkan oleh perbankan sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara aspek kehati-hatian (prudential) dan aspek potensi UMKM (yang masih belum bankable).
7. Perlunya penyediaan sumber daya manusia pengelola Satgas Daerah KK MB dalam bentuk staf Unit Bantuan Teknis (UBT) jumlah cukup, memiliki kompetensi, kapabilitas yang memadai, dan bekerja secara full time untuk menggerakkan dan mempercepat operasionalisasi Satgas Daerah KKMB.

8. Perlunya peningkatan intensitas forum-forum komunikasi diantara Bank, KKMB, Usahawan, dan stakeholder terkait lainnya sebagai media untuk menyamakan persepsi terkait dengan implementasi penyaluran kredit untuk UMKM, terutama kredit usaha mikro.
9. Perlunya peningkatan optimalitas pemanfaatan dana-dana BUMN (melalui Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM terutama melalui pembiayaan usaha mikro di daerah.(Saleh 2015)

Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan UMKM

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah :

1. Prinsip pemberdayaan UMKM :

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b) Perwujudan kebijaksanaan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah
- d) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.(UU RI No. 20 tahun 2008)

Secara umum kebijakan dalam pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri,

berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk UMKM. Dalam rangka itu, UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perizinan usaha, antara lain, dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan.

Di samping itu, budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah

- 1) Penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi;
- 2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia;
- 3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan
- 4) Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.

Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional;
- 2) Penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro;
- 3) Penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta
- 4) Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil. (Putriana 2014)

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. UMKM menyerap hingga 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal ini berarti UMKM berperan penting dalam mengurangi angka

pengangguran, yang merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

2. Mampu mendistribusikan pendapatan secara merata. UMKM biasanya berskala kecil dan menengah, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Hal ini berarti UMKM berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, yang juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.
3. Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sebesar 61,07% pada tahun 2021. Hal ini berarti UMKM berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 64,2 juta. Jumlah ini merupakan potensi yang besar untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. (Huda, 2023)

SIMPULAN

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan peran UMKM tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM, seperti akses permodalan, teknologi, dan daya saing. UMKM memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Untuk meningkatkan peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a) Meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan. UMKM biasanya kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan. Pemerintah perlu memberikan berbagai fasilitas permodalan bagi UMKM, seperti kredit usaha rakyat (KUR), skema penjaminan kredit, dan insentif pajak.
- b) Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi. Teknologi dapat membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam penggunaan teknologi.
- c) Meningkatkan daya saing UMKM. UMKM perlu memiliki daya saing yang tinggi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha besar. Pemerintah perlu memberikan berbagai bantuan dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardito, L., Petruzzellis, L., Panniello, U., & Rea, M. 2020. Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara: Sebuah analisis empiris. *Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan*, 11(3), 230-246.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Kemiskinan 2022. *Jakarta: BPS*.
- Huda, Nahlul. 2023. Peran UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomi Indef*
- Ikkal, Muhammad, Sri Wahyuni Mustafa, and Lanteng Bustami. 2018. "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 4(1): 35-46.
- Kusumawardhani, A., & Sukmawani, S. 2018. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 13(3), 743-755.
- Putriana. 2014. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh : Putriana Pendahuluan." *Artikel Jurnal Ilmiah* 15(2): 117.
- Rini, Ayu Setyo, and Lilik Suguharti. 2016. "Jurnal Ilmu Ekonomi." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 1(2): 88-104.
- Saleh, Mahadin. 2015. "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembardayaan Sektor Umkm." *Jurnal Muamalah* 5(2): 170-77.
- Sukirno, S. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. *Grafindo Persada*
- Supriyanto, -. 2012. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 3(1): 1-16.
- Tambunan, Tulus T H et al. 2012. "Pengentasan Kemiskinan Di Daerah the Role of Micro and Small Enterprise in Regional Poverty Allevation." : 73-92.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah